

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

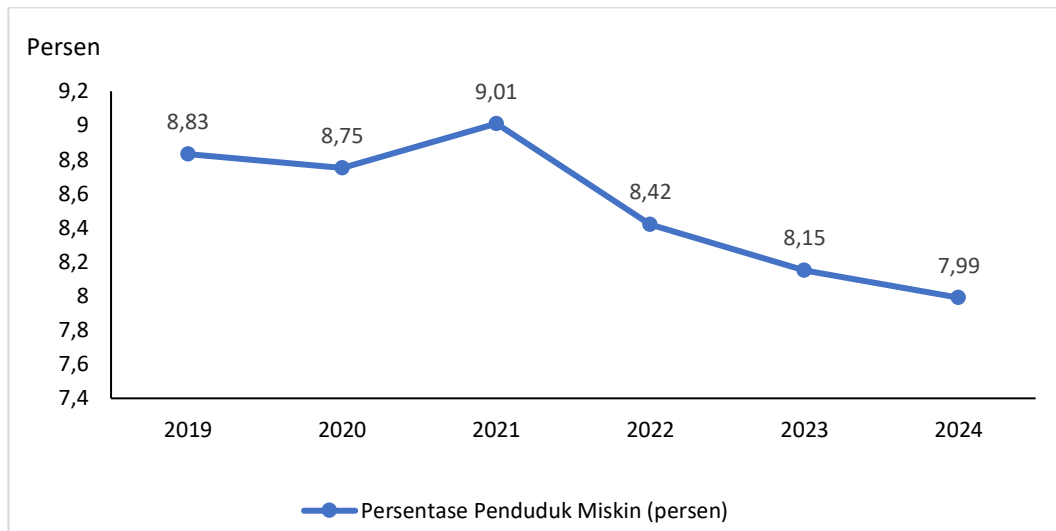
Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar pangan, tetapi juga mencerminkan rendahnya kualitas pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan. Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Permasalahan ini secara konsisten mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kemiskinan umumnya diukur berdasarkan pendekatan garis kemiskinan, yang mencerminkan batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Besar kecilnya persentase penduduk miskin ditentukan oleh jumlah individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut. Dengan demikian, seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila tingkat pengeluaran bulannya belum mampu memenuhi standar kebutuhan dasar sebagaimana ditetapkan dalam perhitungan garis kemiskinan (Nasution *et al.*, 2018).

Kemiskinan menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh makanan pokok yang berkualitas, akses yang lebih sedikit terhadap layanan kesehatan yang baik, berkurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, peluang kerja yang minim dan kondisi ekonomi yang lemah, kurangnya akses terhadap tempat tinggal dan sanitasi, serta kesulitan dalam mendapatkan air bersih (Suhandi et al., 2018).

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tidak hanya terlihat dari masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga dari adanya perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota. Perkembangan kemiskinan di tingkat provinsi menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara tercatat sebesar 8,15 persen dan menurun menjadi 7,99 persen pada Maret 2024. Selanjutnya, pada September 2024 persentase tersebut kembali menurun menjadi 7,19 persen atau sekitar 1,11 juta jiwa. Meskipun menunjukkan tren penurunan, kondisi tersebut belum menggambarkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Sumatera Utara karena tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota masih menunjukkan perbedaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2019), Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 33 kabupaten/kota, yang mencakup 8 wilayah kota dan 25 wilayah kabupaten. Adapun perkembangan persentase penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Rata-Rata Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2019-2024 (persen)

Sumber : (BPS Sumut, 2024)

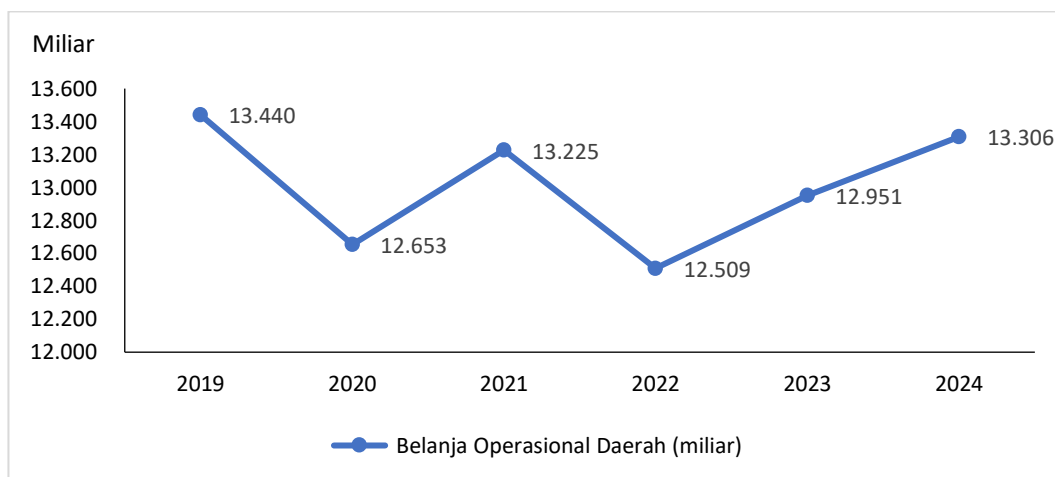
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2019 tercatat rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 8.83 persen kemudian menurun menjadi 8.75 persen pada 2020. Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan tajam hingga tahun 2021 mencapai 9.01 persen, penyebab utama kenaikan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi, meningkatkan angka pengangguran, maupun menurunkan daya beli masyarakat. Selama periode 2019 hingga 2024, persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Utara berada di bawah rata-rata nasional. Resesi ekonomi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), berkurangnya kesempatan kerja, serta kenaikan harga kebutuhan pokok. Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok (makanan dan non-makanan) juga mendorong peningkatan garis kemiskinan, sehingga lebih banyak

penduduk jatuh ke kategori miskin. Tahun 2022 wilayah Sumatera Utara sudah dapat pulih dari resesi ekonomi, hal ini dilihat dari rata-rata persentase penduduk miskin semakin menurun menjadi 8.42 persen dan terus menurun secara bertahap hingga mencapai 7.99 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara masih bersifat dinamis.

Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan serta realisasi anggaran pembangunan. Pemerintah daerah berperan mengurangi kemiskinan dengan mengoptimalkan belanja operasional daerah seperti Belanja Bantuan Sosial (Bansos) contohnya bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Belanja Hibah contohnya BOS Pendidikan, yaitu bantuan kepada satuan pendidikan, khususnya pendidikan swasta. secara tepat sasaran. Optimalisasi dilakukan dengan memperluas jaring pengaman sosial, membiayai pelatihan pemberdayaan ekonomi, dan menekan biaya pendidikan serta kesehatan bagi warga prasejahtera (Nuranisa, 2022).

Menurut Cut *et al.*, (2024) belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin atau aktivitas sehari-hari dalam penyelenggaraan pemerintahan. karena realisasi belanja operasional daerah yang tepat menjadi tolok ukur suatu keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara tepat, agar dapat meningkatkan produktivitas perekonomian.

Semakin tinggi produktivitas perekonomian maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Belanja operasional daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun perkembangan belanja operasional daerah di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Rata-rata Perkembangan Belanja Operasional Daerah Sumatera Utara Tahun 2019-2024 (miliar rupiah)

Sumber : (DJPB Kemenkeu, 2024)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas terlihat bahwa perkembangan data belanja operasional daerah Sumatera Utara selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga 2024 terus mengalami perkembangan fluktuasi terdapat beberapa tahun meningkat dan juga di tahun lainnya menurun. Fluktuasi Belanja Operasional Daerah di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019–2024 menunjukkan adanya perubahan kebutuhan dan prioritas penganggaran pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Penurunan belanja pada beberapa periode dapat terjadi akibat penyesuaian kebijakan fiskal dan perubahan prioritas pembangunan, sedangkan peningkatan belanja terutama berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian anggaran untuk merespons kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, pada masa pemulihan ekonomi, struktur dan alokasi belanja kembali mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perkembangan BOD selama periode penelitian menunjukkan pola yang berfluktuasi dan tidak selalu mengalami peningkatan secara konsisten.

Tahun 2019 tercatat rata-rata dana operasional sebesar 13.440 miliar rupiah kemudian menurun di tahun 2020 dengan rata-rata menjadi sebesar 12.653 miliar rupiah. Meningkat di tahun 2021 dengan rata-rata mencapai 13.225 miliar rupiah, tahun 2022 pada masa pemulihan setelah covid-19 belanja operasional daerah menurun menjadi 12.653 miliar rupiah. Tahun 2023 dana operasional daerah kembali meningkat dengan rata-rata 12.951 miliar dan tahun 2024 meningkat sebesar 13.306 miliar pertahun.

Fenomena menarik terlihat pada tahun 2021, belanja operasional daerah meningkat drastis dengan rata-rata mencapai 13.225 miliar rupiah, namun pada saat yang sama tingkat kemiskinan justru mengalami kenaikan menjadi 9.01 persen. Kondisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori ekonomi Keynesian dalam penelitian (Linda *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa peningkatan belanja operasional pemerintah seharusnya mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Salah satu faktor yang berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah penerapan instrumen kebijakan fiskal melalui mekanisme desentralisasi fiskal. Dalam konteks pembangunan daerah, perubahan tingkat kemiskinan sering

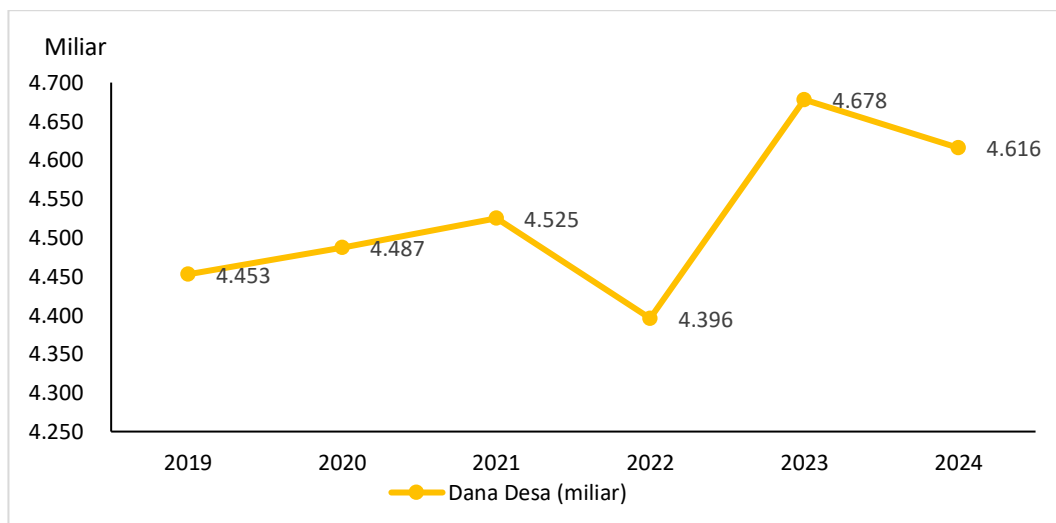
digunakan sebagai indikator untuk menilai efektivitas maupun kelemahan kebijakan pemerintah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mendorong intervensi yang lebih tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di tingkat daerah (Kemenkeu, 2021).

Menurut Sunarya & Silvia, (2019) pada kerangka teori desentralisasi fiskal peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat lebih efektif dicapai apabila penyediaan barang dan jasa publik dilakukan oleh pemerintah pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap preferensi masyarakat setempat, lebih dekat secara administratif maupun geografis dengan penduduk, serta lebih mengetahui karakteristik dan kebutuhan spesifik wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah Dana Desa. Menurut Christia *et al.*, (2019) dana desa merupakan komponen penting dalam struktur belanja negara yang berfungsi mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di setiap daerah guna mempercepat pembangunan di daerah serta mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran dana desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, menurunkan tingkat kemiskinan, mendorong pertumbuhan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Variabel Dana Desa telah banyak dikaji dalam penelitian

sebelumnya, di antaranya oleh (Angga, 2020) yang menunjukkan relevansi Dana Desa sebagai instrumen kebijakan dalam mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan di Indonesia.

Kebutuhan pembangunan desa mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sehingga masyarakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya (Magal, *et al.*, 2021). Adapun rata-rata perkembangan dana desa di provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Rata-Rata Perkembangan Dana Desa di Sumatera Utara Tahun 2019-2024 (miliar rupiah)

Sumber : DJPK (2024)

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas terlihat bahwa dana desa di wilayah Sumatera Utara mengalami perkembangan fluktuasi. Fluktuasi dana desa di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019–2024 menunjukkan bahwa alokasi dana desa tidak mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran dan formula pengalokasian dana desa, serta perubahan

prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa. Peningkatan dana desa pada beberapa tahun menunjukkan adanya dukungan fiskal terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan penurunan alokasi pada tahun tertentu mencerminkan adanya penyesuaian dalam kebijakan dan penganggaran.

Tahun 2019 tercatat sebesar 4.453 miliar rupiah terus meningkat hingga 2021 menjadi 4.525 miliar rupiah. Namun di tahun 2022 dana desa yang diterima provinsi Sumatera Utara menurun dari tahun sebelumnya menjadi 4.396 miliar rupiah, sedangkan di tahun 2023 dana desa kembali meningkat drastis rata-rata mencapai 4.678 miliar rupiah, lalu tahun 2024 terjadi penurunan dana desa hingga sebesar 4.616 miliar rupiah. Penelitian Hasbiah *et al.*, (2025) menyatakan bahwa dana desa diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

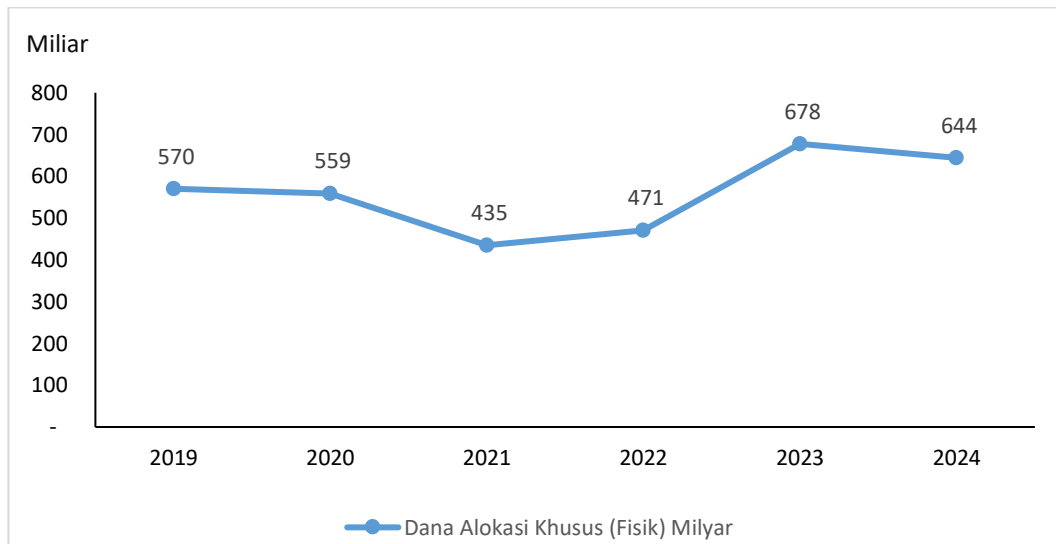
Fenomena yang berkaitan dengan Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021, dana desa tercatat meningkat hingga mencapai 4.525 miliar rupiah, namun pada periode yang sama persentase penduduk miskin justru mengalami kenaikan menjadi 9,01 persen. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan alokasi anggaran dan capaian indikator kesejahteraan masyarakat, Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan anggaran yang tidak diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan mengindikasikan bahwa besarnya alokasi dana belum tentu secara langsung memberikan dampak terhadap penurunan

kemiskinan tanpa didukung oleh efektivitas pengelolaan, ketepatan sasaran, serta kualitas implementasi program di tingkat desa.

Kemiskinan daerah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta konektivitas wilayah. Keterbatasan infrastruktur tersebut dapat menghambat aktivitas ekonomi, meningkatkan biaya transportasi, dan mempersempit kesempatan kerja, sehingga memperkuat kondisi kemiskinan masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di daerah. Peran DAK Fisik terhadap kemiskinan diharapkan melalui pembangunan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, jalan, irigasi, serta infrastruktur dasar lainnya mampu meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sehingga dapat menurunkan kemiskinan (Awaludin & Wibowo, 2023).

Setiap tahunnya, Provinsi Sumatera Utara menerima transfer anggaran dari pemerintah pusat, salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, yang selanjutnya dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Adapun perkembangan dana alokasi khusus (fisik) provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4 Rata-rata Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2024 (miliar rupiah)

Sumber : DJPK (2024)

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas terlihat bahwa dana alokasi khusus fisik di Sumatera Utara juga menunjukkan pola yang berfluktuasi. Tahun 2019 tercatat sebesar 570 miliar rupiah kemudian menurun hingga tahun 2021 menjadi sebesar 435 miliar rupiah. Selanjutnya tahun 2022 DAK Fisik Kembali meningkat setiap tahunnya hingga 2023 tercatat sebesar 678 miliar rupiah, namun di tahun 2024 kembali menurun menjadi sebesar 644 miliar rupiah. Fenomena menarik terkait DAK dapat dilihat pada tahun 2021 penurunan DAK Fisik yang disertai penurunan kemiskinan akibat kondisi pandemic covid-19, selanjutnya tahun 2024 dimana nilai DAK Fisik mengalami peningkatan namun pada sisi kemiskinan juga ikut menurun. Fenomena ini menandakan bahwa pengurangan dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur publik berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemiskinan bukan justru menurunkan kemiskinan.

Secara keseluruhan, fenomena yang terlihat menunjukkan bahwa hubungan antara belanja operasional daerah, dana desa, dan dana alokasi khusus (fisik) terhadap kemiskinan tidak selalu bersifat linier. Peningkatan anggaran pemerintah tidak secara otomatis diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, sehingga diperlukan kajian empiris lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Meskipun secara agregat tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir hingga 2024, kondisi tersebut tidak mencerminkan situasi yang seragam pada seluruh kabupaten/kota. Pada kenyataannya, kemiskinan di Sumatera Utara memiliki karakteristik spasial yang sangat beragam, di mana terdapat daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi yang berdampingan dengan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan rendah.

Beberapa wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses ekonomi seperti Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal secara umum dikenal memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, akses pasar, kesempatan kerja, serta dominasi sektor pertanian tradisional. Sebaliknya, daerah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kota Binjai

cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, dan akses infrastruktur yang lebih baik.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis kemiskinan yang dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan variabel belanja operasional daerah, dana desa, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagai variabel independen. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji kemiskinan dengan menggunakan variabel makroekonomi lain seperti penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta utang luar negeri, penelitian ini menekankan peran instrumen fiskal daerah dalam memengaruhi tingkat kemiskinan.

Fenomena adanya variasi antar kabupaten/kota sekaligus perubahan antar waktu menunjukkan bahwa permasalahan yang dikaji memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi spasial (perbedaan antar daerah) dan dimensi temporal (perubahan antar tahun). Oleh karena itu, penggunaan metode data panel menjadi sangat relevan, karena mampu menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap kemiskinan dengan mempertimbangkan kedua dimensi tersebut secara simultan sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif pada masing-masing daerah yang diteliti. Hal ini berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang banyak menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM). Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang digunakan, sehingga diharapkan dapat memberikan temuan empiris yang relevan dengan karakteristik wilayah penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“Pengaruh Belanja Operasional Daerah, Dana Desa, Dan Dana Alokasi Khusus (Fisik) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun fokus permasalahan yang akan di bahas atau di teliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Belanja Operasional Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di 27 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di 27 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Tingkat Kemiskinan di 27 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Operasional Daerah, Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Tingkat Kemiskinan di 27 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan adanya penelitian ini berguna untuk:

1. Mengetahui Pengaruh Belanja Operasional Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di 27 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.

2. Mengetahui Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di 27 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Fisik) terhadap Tingkat Kemiskinan di 27 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.
4. Mengetahui Pengaruh Belanja Operasional Daerah, Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Tingkat Kemiskinan di 27 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang ekonomi pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh belanja operasional daerah, dana desa, dan dana alokasi khusus fisik terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
2. Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik kemiskinan, terutama penelitian yang menggunakan variabel belanja operasional daerah, dana desa dan dana alokasi khusus fisik dengan metode data panel.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur terkait penggunaan metode data panel dalam menganalisis pengaruh antar variabel pada Kabupaten/Kota di Sumatere Utara.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memutuskan kebijakan ekonomi khususnya berkaitan dengan belanja operasional daerah, dana desa, dan dana alokasi khusus fisik dalam proses pengentasan kemiskinan.
2. Bagi pelaku ekonomi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau panduan berbasis data untuk memproyeksikan potensi pasar di daerah, serta menyusun strategi investasi dan bisnis yang lebih tepat sasaran berdasarkan arah alokasi anggaran pemerintah agar dapat menurunkan angka kemiskinan.
3. Kepada masyarakat khususnya Sumatera Utara penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pengaruh belanja operasional daerah, dana desa dan dana alokasi khusus fisik terhadap tingkat kemiskinan